



SKPD Didorong Terapkan Laporan Keuangan Berbasis Akrual

JOGJA—Predikat pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang enam kali berturut-turut disandang Pemkot Jogja mendorong pemberlakuan pelaporan keuangan dengan sistem akrual di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Jogja Kadri Renggono mengungkapkan sistem akrual lebih rumit ketimbang laporan keuangan berbasis kas seperti yang digunakan selama ini.

Dicontohkannya, laporan keuangan daftar SPT pajak yang dibuat oleh DPDPK dapat langsung dicatat dalam laporan berbasis akrual, sementara pada sistem kas, pencatatan keuangan baru dilakukan sesuai pembayaran. "Pelaporan keuangan berbasis akrual memungkinkan sebuah SKPD mencatat aset yang menjadi haknya dan pencatatan bisa dilakukan langsung seketika tanpa menunggu di akhir kegiatan," ujarnya.

Laporan berbasis akrual, kata Kadri, memang lebih rumit namun sisi positifnya semakin transparan. Pasalnya, setiap kegiatan pencatatan keuangan akan terhubung langsung dengan neraca yang berkaitan seperti dalam pencatatan akuntansi. Konsekuensinya, laporan keuangan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan bertambah menjadi tujuh jenis. Sebelumnya, audit laporan keuangan meliputi, neraca keuangan, arus kas, catatan laporan keuangan, serta realisasi anggaran. Dengan pencatatan berbasis akrual maka terdapat penambahan tiga laporan yang salah satunya merupakan laporan ekuitas.



Kadri Renggono
 Kepala Dinas
 Pajak Daerah dan
 Pengelolaan Keuangan
 (DPDPK) Jogja

"Kami siap melakukan pendampingan kepada SKPD yang kesulitan menjalankan sistem pelaporan ini."

Kadri mengatakan, sebanyak 52 SKPD di lingkup Pemkot Jogja harus sudah dapat menerapkan sistem ini pada akhir tahun. Sampai dengan September, hanya tiga SKPD yang sudah menerapkan laporan keuangan berbasis akrual, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kantor Pengelola Taman Pintar, dan Kecamatan Tegalrejo dan 12 SKPD sudah menerapkan laporan pengeluaran. "Kami siap melakukan pendampingan kepada SKPD yang kesulitan menjalankan sistem pelaporan ini," tuturnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005